



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 11 Februari 2020

Halaman: 9

PELANGGARAN HOTEL VIRTUAL DITELUSURI

Wilayah Diminta Awasi Operasional Pondokan

YOGYA (KR) - Aparatur di wilayah terutama pihak kecamatan diminta memperketat pengawasan operasional pondokan. Hal ini lantaran izin pondokan selama ini diarpu oleh kecamatan. Apalagi keberadaan hotel virtual yang melibatkan pondokan ditengarai cukup marak.

Kepala Sat Pol PP Kota Yogyakarta Agus Winarto mengaku koordinasi dengan kecamatan sudah ia lakukan beberapa kali kaitannya dengan pondokan. "Sudah kami minta untuk lebih intensif memantau pondokan di wilayah masing-masing. Tiap kecamatan juga memiliki personel Sat Pol PP," katanya, Senin (10/2).

Menurutnya, pihaknya saat ini terus menelusuri keberadaan pondokan yang operasionalnya melibatkan hotel virtual. Sesuai amanat Perda Pendirian Pondokan, setiap jenis usaha pemondokan tidak boleh disewakan kurang dari sebulan. Sedangkan dugaan pelanggaran yang terjadi ialah manajemen hotel virtual menyewakan kamar pondokan secara harian. Biasanya, kamar yang disewakan jenis pondokan eksklusif atau berkamufase guest house.

Agus mengaku, berdasar laporan yang ia terima, dugaan pelanggaran operasional pondokan banyak terjadi di wilayah Yogya sisi selatan. "Kami sudah memproses satu pondokan yang diketahui disewakan secara harian. Jika dari sisi perizinannya tidak sesuai, sanksi penutupan bisa dijatuhkan. Tahapannya akan disesuaikan dengan perda," katanya.

Sementara Camat Umbulharjo Rumpis Trimintarta membenarkan ada satu pondokan jenis eksklusif yang tengah diklarifikasi. Pihaknya bersama Sat Pol PP yang diperbantukan di wilayah sudah mengecek keberadaan pondokan tersebut namun pemiliknya belum mampu menunjukkan izin. Jumlah kamar yang dimiliki mencapai lebih dari sepuluh kamar. Seluruhnya berkelas eksklusif dan dugaannya mengarah pada hotel virtual. "Dari kondisinya, seharusnya izinnya bukan pondokan melainkan penginapan," terangnya.

Rumpis mengaku, pengawasan dan pembinaan pondokan yang ada di Umbulharjo memang menjadi kewenangan kecamatan. Namun untuk tindakan yustisi berada di ranah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sedangkan jumlah pondokan yang ada di Kecamatan Umbulharjo cukup banyak mencapai ratusan unit. Kegiatan pengawasan dan pembinaan pun turut menggandeng Kampung Pancer Tertib yang sudah terbentuk. (Ihi)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Umbulharjo 2. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005